1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

   Hasil pemantauan harga barang kebutuhan pokok di Kabupaten Purwakarta pada triwulan II tahun 2026 dilaksanakan sejak bulan April sampai dengan Juni 2026 melalui pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari hasil survei lapangan, serta melalui laporan harga yang dikirimkan oleh para pengelola pasar di bawah UPTD, meliputi Pasar Leuwipanjang, Pasar Citeko, dan Pasar Wanayasa.

   Komoditas yang menjadi fokus pemantauan meliputi berbagai jenis barang kebutuhan pokok masyarakat, antara lain beras, cabai, bawang, sayuran, daging ayam, daging sapi, telur ayam, ikan, gula pasir, gula merah, tepung terigu, minyak goreng, tahu, tempe, susu formula, dan buah-buahan.

   Berdasarkan hasil pemantauan harga selama Triwulan II, ditemukan adanya fluktuasi harga pada beberapa komoditas, baik berupa kenaikan maupun penurunan yang terjadi pada periode tertentu. Untuk memudahkan analisis, data harga tersebut dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu komoditi hasil pertanian, komoditi hasil perikanan dan peternakan, serta komoditi hasil industri. Berikut adalah hasil pemantauan harga barang kebutuhan pokok selama triwulan II tahun 2026.

   1. Harga Barang Pokok Komoditi Pertanian

   Berikut adalah diagram rata-rata harga barang kebutuhan pokok komoditi pertanian di Kabupaten Purwakarta selama triwulan II tahun 2026 :

   https://drive.google.com/file/d/1wnyPfwbPQSWcJJcOMWUw3mNuqep6oFFA/view?usp=sharing

   Berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat bahwa jenis barang pokok komoditi pertanian yang mengalami kenaikan harga yang signifikan dan menjadi perhatian adalah bawang merah, bawang putih dan cabe rawit. Berdasarkan penjelasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan BPS kenaikan harga bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit umumnya disebabkan oleh kombinasi faktor produksi, distribusi, dan permintaan.

   Berikut beberapa penjelasan faktor yang menyebabkan kenaikan harga komoditi bawang merah, barang putih dan cabe rawit diantaranya ketergantungan Indonesia terhadap impor menyebabkan harga sensitif terhadap perubahan harga dunia, terhambatnya impor akibat kebijakan perdagangan atau gangguan logistik, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah, produksi domestik masih rendah dibanding kebutuhan nasional, masa tanam dan panen tidak bersamaan sehingga pasokan berkurang, dan distribusi terganggu sehingga biaya angkut meningkat.

   2. Harga Barang Pokok Komoditi Perikanan dan Peternakan

   Berikut adalah diagram rata-rata harga barang pokok komoditi perikanan dan peternakan di Kabupaten Purwakarta selama triwulan II tahun 2026 :

https://drive.google.com/file/d/13QykazVMatWR3oMQ1iRZJoXeDWo6RxBn/view?usp=sharing

Berdasarkan diagram di atas, kenaikan harga yang mendapatkan perhatian bagi pemerintah adalah kenaikan pada barang pokok komoditi daging Sapi. Kenaikan harga komoditi tersebut terjadi karena tingginya permintaan menjelang Hari Raya Idul Adha.

3. Harga Barang Pokok Komoditi Hasil Industri

Berikut adalah diagram rata-rata harga barang pokok komoditi Hasil Industri di kabupaten purwakarta selama triwulan II tahun 2026 :

https://drive.google.com/file/d/1xfasi9WG8WaZE0Ug20MyKrAO2uFCGW9G/view?usp=sharing

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata harga komoditi hasil industri cenderung lebih stabil dibandingkan dengan komoditi hasil pertanian dan peternakan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

    - Rata-rata harga barang pokok komoditi pertanian yang mengalami kenaikan harga yang signifikan dan menjadi perhatian adalah bawang merah, bawang putih dan cabe rawit. Tingginya harga beberapa komoditi pertanian di triwulan II menjadi perhatian baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kenaikan harga bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit umumnya disebabkan oleh kombinasi faktor produksi, distribusi, dan permintaan. Kenaikan harga komoditi bawang merah, barang putih dan cabe rawit diantaranya ketergantungan Indonesia terhadap impor menyebabkan harga sensitif terhadap perubahan harga dunia, terhambatnya impor akibat kebijakan perdagangan atau gangguan logistik, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah, produksi domestik masih rendah dibanding kebutuhan nasional, masa tanam dan panen tidak bersamaan sehingga pasokan berkurang, dan distribusi terganggu sehingga biaya angkut meningkat
    - Rata-rata harga barang pokok komoditi perikanan dan peternakan mengalami kenaikan adalah daging Sapi. Kenaikan harga komoditi tersebut terjadi karena tingginya permintaan menjelang Hari Raya Idul Adha.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

    - Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait, distributor dan penyedia barang pokok;
    - Melaksanakan Pemantauan harga barang pokok secara langsung ke lapangan dan secara rutin;
    - Melaksanakan kunjungan secara langsung kepada pelaku usaha maupun melalui pengiriman data dari para pelaku usaha secara rutin;
    - Melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM);
    - Melaksanakan Monitoring Ketersediaan, Pendistribusian dan Evaluasi HET LPG 3 Kg di Kabupaten Purwakarta;
    - Melaksanakan Pengawasan Budidaya Ikan Keramba Jaring Apung (KJA);
    - Melaksanakan Monitoring Pangan Asal Hewan (PAH);
    - Melaksanakan Pengawasan Mutu dan Peredaran Pakan;
    - Melaksanakan Pelayanan Uji Kir Semi Drive Thru sebagai salah satu upaya menjaga

kelayakan dan efisiensi operasional kendaraan angkutan barang serta penumpangnya. Hal ini memastikan kelancaran distribusi logistik, mencegah hambatan rantai pasok, serta menekan potensi lonjakan biaya transport yang memicu kenaikan harga barang di pasar.
    - Melaksanakan Pembangunan dan Pemeliharaan jalan di wilayah Kabupaten Purwakarta untuk mendukung kelancaran distribusi barang, memangkas biaya logistik dari kawasan produksi ke pasar, serta menstabilkan harga komoditas pangan guna mengendalikan inflasi

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

   Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian daerah dan mengendalikan tekanan inflasi, Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah telah melaksanakan berbagai langkah dan kebijakan strategis. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, diperlukan penguatan pada beberapa aspek agar upaya pengendalian inflasi dapat dilaksanakan secara lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan, antara lain:

    - Penguatan koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah terkait, khususnya dalam pemantauan perkembangan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi komoditas yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi.
    - Optimalisasi pemantauan harga dan ketersediaan komoditas pangan strategis secara berkala sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi kenaikan harga dan kelangkaan pasokan di wilayah Kabupaten Purwakarta.
    - Peningkatan efektivitas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan, dengan mempertimbangkan wilayah dan komoditas yang mengalami tekanan harga sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat sasaran.
    - Penguatan pengawasan terhadap distribusi LPG Tabung 3 Kilogram, terutama terkait ketersediaan, kelancaran distribusi, penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET), serta ketepatan sasaran penyaluran kepada masyarakat yang berhak.
    - Peningkatan pemanfaatan data dan informasi sebagai dasar perumusan kebijakan, melalui penyediaan data harga, pasokan, kebutuhan, dan distribusi komoditas secara akurat, berkala, dan terintegrasi antarperangkat daerah.
    - Penguatan langkah antisipatif menghadapi periode tertentu yang berpotensi meningkatkan tekanan inflasi, seperti hari besar keagamaan, tahun ajaran baru, perubahan musim, serta kondisi lainnya yang dapat memengaruhi permintaan dan pasokan barang.
    - Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengendalian inflasi, sehingga setiap kebijakan dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat diukur efektivitasnya serta menjadi dasar dalam menentukan langkah tindak lanjut.
    - Meningkatkan peran serta pelaku usaha, distributor, pasar, dan masyarakat dalam mendukung kelancaran distribusi dan menjaga stabilitas harga, sehingga upaya pengendalian inflasi dapat dilaksanakan secara kolaboratif dan berkelanjutan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

   Berikut ini beberapa rekomendasi/ langkah-langkah yang akan diambil dalam rangka kebijakan pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Purwakarta:

    - Meningkatkan koordinasi dan sinergi TPID dengan perangkat daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, distributor, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mengantisipasi

dan menangani potensi tekanan inflasi.

- Mengoptimalkan pemantauan perkembangan harga dan ketersediaan komoditas pangan strategis secara berkala sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi kenaikan harga maupun gangguan pasokan.
- Meningkatkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan secara tepat sasaran, terutama pada wilayah dan komoditas yang mengalami kenaikan harga.
- Memperkuat koordinasi pengamanan pasokan dan kelancaran distribusi pangan, termasuk melalui koordinasi dengan daerah penghasil dan distributor guna memastikan ketersediaan komoditas strategis di Kabupaten Purwakarta.
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap distribusi LPG Tabung 3 Kilogram, khususnya terkait ketersediaan, ketepatan sasaran, penerapan HET, serta kepatuhan pangkalan terhadap ketentuan yang berlaku.
- Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi harga secara berkala dan terintegrasi sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan langkah intervensi pengendalian inflasi yang lebih cepat dan tepat sasaran.
- Menyiapkan langkah antisipasi terhadap periode yang berpotensi meningkatkan tekanan inflasi, antara lain menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), perubahan musim, serta kondisi lain yang dapat memengaruhi pasokan dan permintaan.
- Meningkatkan pengawasan terhadap kelancaran distribusi dan rantai pasok, termasuk mengidentifikasi potensi hambatan distribusi yang dapat menyebabkan kelangkaan maupun peningkatan harga komoditas.
- Mendorong peningkatan produksi dan ketersediaan komoditas pangan lokal, melalui optimalisasi pemanfaatan lahan, penguatan produksi komoditas strategis, serta pemberdayaan petani dan pelaku usaha lokal.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program pengendalian inflasi, guna memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai target serta menghasilkan tindak lanjut yang efektif dan berkelanjutan.